

**TESIS**

**PENERAPAN ASAS UPAYA PERDAMAIAN (*ISLAH*) DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PADA  
WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT**



**OLEH:**

**PRIMA YENNI**  
**BP:1920112027**

**KOMISI PEMBIMBING:**

**PROF. DR. YASWIRMAN, M.A.**  
**DR. YASNIWATI, S.H.,M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

**PENERAPAN ASAS UPAYA PERDAMAIAN (*ISLAH*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT**

**(Prima Yenni,S.H, NIM 192011027, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Tahun 2023)**

**ABSTRAK**

Upaya mendamaikan dalam sidang Pengadilan Agama bersifat "*imperatif*" atau memaksa. Upaya mendamaikan wajib untuk dilakukan pada setiap tahapan persidangan perceraian hingga perkara tersebut diputus sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Upaya mendamaikan merupakan perwujudan asas upaya perdamaian (*Islah*) yang merupakan salah asas khusus pada peradilan agama. Asas merupakan dasar dari penyusun produk hukum acara perdata. Munculnya pembaharuan hukum acara perdata yakni persidangan secara elektronik telah mengubah penerapan upaya damai dalam persidangan. Pada pengadilan Agama wilayah hukum Sumatera Barat, persidangan secara elektronik telah menjadi program prioritas oleh pengadilan sehingga semenjak dikeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik yang diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 masing-masing pengadilan berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan layanan persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dilakukan dengan tukar menukar dokumen persidangan melalui aplikasi e-Court sehingga pertemuan pihak dan majelis hakim sudah tidak terjadi dan terbatas akibatnya kesempatan untuk melakukan upaya untuk mendamaikan menjadi kecil dan memperkecil peluang terjadinya perdamaian. Bentuk lain dari upaya damai di Pengadilan adalah mediasi yang dapat dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik. Mediasi elektronik sebagai alternatif pelaksanaan mediasi memiliki tujuan yang sama dengan mediasi konvensional yakni sebagai wujud upaya perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas upaya perdamaian (*Islah*) dalam penyelesaian perkara perceraian secara elektronik melalui majelis hakim di pengadilan agama di wilayah hukum Sumatera Barat, untuk mengetahui bagaimana penerapan mediasi secara elektronik pada pengadilan agama di wilayah hukum Sumatera Barat serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik tersebut. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris dan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier dan data-data tersebut dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan asas upaya perdamaian (*Islah*) pada perkara perceraian yang diselesaikan secara elektronik melalui majelis hakim tidak dapat dilakukan pada setiap tahapan persidangan. Mediasi secara elektronik belum terselenggara sebagaimana aturan yang berlaku. Terdapat kendala dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik baik itu kendala internal maupun kendala dari eksternal.

Kata kunci: Upaya Perdamaian, Perkara Perceraian, Persidangan secara elektronik.

**APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PEACE Efforts (ISLAH) IN ELECTRONIC SETTLEMENT OF DIVORCE CASES IN RELIGIOUS COURTS IN THE JURISDICTION OF WEST SUMATRA**

**(Prima Yenni, S.H, NIM 192011027, Postgraduate Masters of Law Program, Faculty of Law, Andalas University in 2023)**

**ABSTRACT**

Efforts to reconcile in the trial of the Religious Courts are "imperative" or coercive. Efforts to reconcile must be made at every stage of the divorce trial until the case is decided as stipulated in Article 39 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 31 PP Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 65 and Article 82 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts jo. Article 115 Presidential Decree No. 1 of 1991 concerning the Dissemination of Compilation of Islamic Law. Efforts to reconcile is the embodiment of the principle of peace efforts (Islah) which is one of the special principles in the religious courts. The principle is the basis for compiling civil procedural law products. The emergence of reforms to civil procedural law, namely electronic trials, has changed the application of peaceful efforts in trials. At the Religious Courts of the jurisdiction of West Sumatra, electronic trials have become a priority program by the court so that since the issuance of PERMA Number 1 of 2019 concerning Administration of Cases and Trials in Electronic Courts which has been updated with PERMA Number 7 of 2022 each court has attempted to increase the utilization electronic trial services. Trials are held electronically by exchanging court documents through the e-Court application so that meetings of the parties and the panel of judges no longer occur and are limited as a result the opportunity to make efforts to reconcile is small and reduces the chances of reconciliation. Another form of peaceful efforts in court is mediation which can be done conventionally or electronically. Electronic mediation as an alternative to carrying out mediation has the same goal as conventional mediation, namely as a form of peace efforts. This study aims to determine the application of the principle of peacekeeping efforts (Islah) in electronic divorce settlement through a panel of judges at a religious court in the jurisdiction of West Sumatra, to find out how electronic mediation is applied to religious courts in the jurisdiction of West Sumatra and to find out the obstacles in carrying out electronic mediation. This research method is empirical juridical and descriptive research nature. The data used are primary, secondary and tertiary data and these data are collected by literature and field studies. Based on the results of the study, it can be concluded that the application of the principle of reconciliation (Islah) in divorce cases that are resolved electronically through a panel of judges cannot be carried out at every stage of the trial. Electronic mediation has not been carried out according to applicable regulations. There are obstacles in the implementation of electronic mediation, both internal and external constraints.

Keywords: Peace Efforts, Divorce Cases, Electronic Trials.